

TAJUK RENCANA

Mafia Minyak Goreng

SUMBER penderitaan jutaan rakyat kecil terkait kelangkaan dan harga minyak goreng yang melambung beberapa bulan terakhir ini sudah tekuak secara gamblang. Ternyata semua itu akibat ulah oknum Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdaglu Kemendag), sebagai pihak yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, terlebih rakyat kecil, malah *keblinger* mengekspor *crude palm oil* (minyak kelapa sawit), dengan dalih harga jualnya lebih tinggi.

Sang Dirjen jadi tersangka karena diduga telah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas CPO dan produk turunannya kepada PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT MUltimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Tindakan ini benar-benar sangat tragis dan ironis, tega mengorbankan kepentingan rakyat demi ekspor.

Lebih tragis lagi, perusahaan-perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor, salah satunya karena ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang telah mendistribusikan CPO tidak sesuai dengan harga penjualan di dalam negeri (DPO).

Tindakan *nista* tersebut terungkap setelah Kejagung menetapkan empat tersangka berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng, yakni Sang Dirjen Perdaglu dan tiga tersangka lain dari pihak swasta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian minta aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara dugaan korupsi ekspor minyak kelapa sawit tersebut. Presiden juga meng-

akui bahwa sampai saat ini minyak goreng masih menjadi permasalahan di tengah masyarakat,

Akibat ulah segelintir oknum, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasam yang saat itu ditetapkan Rp 14 ribu perliter, kemudian menjadi barang langka di pasar. Kalau pun ada, harganya sudah melambung tinggi.

Upaya pemerintah mencabut penetapan HET minyak goreng kemasam dan melakukan subsidi terhadap minyak goreng curah dengan harga Rp 14 ribu perliter, juga belum sepenuhnya mampu mengatasi pemenuhan masyarakat terhadap minyak goreng.

Hal itupun diakui Presiden Jokowi, bahwa kebijakan tersebut belum efektif menurunkan harga minyak goreng, apalagi bisa kembali normal. Bahkan Jokowi sudah mengetahui kalau harga minyak curah di pasar banyak yang belum sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah. Itu semua karena memang ada permainan.

Setelah oknum Dirjen itu menjadi tersangka, tentu rakyat juga menunggu kelanjutan proses hukum kasus tersebut. Semoga desakan presiden dan berbagai pihak agar kasus tersebut diusut tuntas, bukan sekadar desakan. Bukan sekadar sandiwara.

Perlu juga kita simak pernyataan Gubernur DUY Sri Sultan terkait ‘permainan’ ekspor minyak kelapa sawit tersebut, “Ya sudah, kalau dia sudah ditetapkan tersangka, berarti memang punya keserakahan. Kalau akhirnya dia dipidana, ya sudah konsekuensinya. Itu saja. Saya minta tegakkan hukum saja.” □

DULU, banyak pakar hukum berbicara tentang *restorative justice* atau keadilan restoratif. Saat itu baru berupa wacana, berhenti di forum ilmiah dan media massa. Tidak jelas wujud konkretnya karena belum ada payung hukumnya untuk diimplementasikan. Kini, dengan ditekennya Peraturan Polri (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kapolri Jenderal Sigit 9 Agustus 2021 baru terasa bahwa *restorative justice* bukan sekadar utopia. Tetapi mulai dapat diimplementasikan.

Di Jakarta ada kasus konkret. Belum lama ini seorang remaja yang mencuri barang di sebuah ritel modern ditangkap. Setelah diproses polisi, sang remaja tidak diteruskan ke Kejaksaan tapi dibebaskan, setelah diketahui dia mencuri barang untuk dijual dan hasilnya untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Tentu ada proses dan persyaratan dilalui sampai dibebaskannya remaja itu.

Konsep Baru

Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada 19 Agustus 2021 itu sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative. Yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dengan *restorative justice* (Rj) kasus-pidana ringan dapat diselesaikan tanpa proses di pengadilan. Pelaku tindak pidana tidak harus masuk penjara. Ini merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodasi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

Rj adalah penyelesaian tindak pidana

Imam Anshori Saleh

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan. Tentu untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Perpol No.8/2021)



KR-JOKO SANTOSO

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Terorisme

Persyaratan umum, penanganan meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil ditentukan, tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik

sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa. Tentu tidak radikalisme dan sparatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan bukan tindak pidana terorisme. Juga bukan tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Agar Rj berjalan efektif mesti ada perubahan mainset masyarakat.. Tidak semua hal mesti harus dipenjara. Ini seiring dengan perubahan tujuan pemidanaan selalu bertumpu pada keadilan pembalasan tapi berubah menjadi keadilan koreksi, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif. Jika penyelesaian perkara pidana menggunakan cara lama, bermuara pada pemidanaan, lembaga pemasyarakatan (Lapas) kita akan semakin *overload*. Saat ini kelebihan kapasitas lapas menurut Wamenkumham Edy Hiarej mencapai 160.000 orang. Selain itu Rj dapat menghindari praktik transaksional dalam penyelesaian perkara pidana.

RJ ini sudah lama diterapkan beberapa negara di Eropa. Aturan dan prosesnya berbeda-beda. Intinya tetap sama: memproses pelaku tindak pidana tertentu tanpa proses pengadilan yang bermuara pada pemidanaan. □

*) **Dr Imam Anshori Saleh MH**, pemerhati hukum, mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial dan mantan anggota DPR-RI.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkann foto-copy identitas. Terimakasih.

Hari Kartini, Pandemi dan Stunting

IM Sunarsih

Salah satunya masalah kesehatan yaitu stunting yang menurut data semakin naik angkanya. Stunting, secara umum, merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya, pertumbuhan gigi lambat dan menurunnya kemampuan kognitif.

Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Faktanya, faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Biasanya, stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia dua tahun.

Masalah Bangsa

Problema stunting bukanlah masalah perempuan. Namun ini merupakan masalah besar bangsa yang harus dipikirkan semua. Meski perempuan dapat berperan dalam penanggulangan stunting dengan memberikan edukasi langsung pada masyarakat sekelilingnya, melalui kelompok masyarakat misal dasa wisma atau melalui seminar untuk jangkauan yang lebih luas. Edukasi dilakukan karena sebagian ibu kurang memahami arti pentingnya kecukupan gizi pada ibu hamil dan anak.

Peran perempuan juga dapat dilakukan seperti pada awal pandemi covid 19. Masyarakat beramai-

ramai membantu warga isoman yang membutuhkan makanan dan obat. Untuk stunting pun dapat dilakukan tidak hanya edukasi, tapi juga pemberian makanan bergizi kepada yang membutuhkan secara bergiliran atau membuat program donasi gizi disertai pemberian pendampingan. Program donasi gizi dapat dilakukan melalui kemitraan dengan pihak lain, yang dapat dilakukan melalui PKK setempat. Selain mendorong pemanfaatan posyandu, PKK dapat terjun langsung sebagai ujung tombak serta motor penggerak penurunan angka stunting.

Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh panutan, tidak hanya diingat dan diperingati jasa jasanya. Namun diikuti perannya, dilanjutkan perjuangannya. Kartini masa kini, perlu memajukan dan menyehatkan masyarakat agar terbebas dari stunting, sebagai upaya meningkatkan kualitas bangsa. □

*) **Dr Dra IM Sunarsih SU Apt**, Penasehat TP PKK DIY, Ketua I YKI Cabang DIY

Pojok KR

Libur Lebaran, 2,3 juta kendaraan diprediksi akan melintasi DIY-Jateng.

- **Macet lagi?**

Gubernur DIY minta kasus hukum terkait minyak goreng ditegakkan.

-- **Harus tegak!**

Bantuan Khusus Keistimewaan (BKK) dapat dikelola oleh kalurahan.

-- **Ini istimewa.**

Beraksi

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Saatnya Tugu KB Dirawat

TUGU Keluarga Berencana (KB) yang di masyarakat banyak orang menyebut sebagai ‘Tugu 2 Jari’ banyak dibangun oleh pemerintah bersama masyarakat di Era KB Mandiri pada tahun 1985-an. Tugu KB ini bertebaran di segenap pelosok penjuru negeri. Bahkan di DIY, terlihat hampir semua pedukuhan memiliki tugu KB sebagai apresiasi masyarakat terhadap program KB yang begitu besar.

Saat ini sudah banyak tugu KB yang rusak dan butuh perawatan, meskipun sebagian dalam kondisi cukup bagus karena dirawat oleh masyarakat secara mandiri. Bahkan di beberapa wilayah, tugu KB di cat ulang, disekitarnya dibuat

taman sehingga tampak indah dan mempesona dengan slogan : *Ayo Ikut KB, 2 Anak Cukup, KB MOP Pancen Oye*. Mengingat tugu KB sebenarnya multifungsi. Disamping sebagai media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang abadi juga sebagai simbol apresiasi masyarakat terhadap Program KB.

Tentu semua itu perlu perencanaan matang. Penganggaran yang jelas, dukungan masyarakat dan regulasi sebagai payung hukum yang jelas pula.

*) **Drs Mardiyah, Ka Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten KulonProgo**

Keserakahan Menumpulkan Jiwa

MIRIS, Mungkin itu kalimat yang tepat diucapkan terkait pemerintahan diour. Bagaimana tidak? Di tengah kesulitan masyarakat akibat pandemi dan harga mulai membubung sejak menjelang Ramadan, kok bisa-bisanya ada oknum menimbun migor. Yang kian menusuk perasaan kemudian adalah ditetapkannya tersangka kasus migor yang merupakan pejabat tinggi negara.

Mungkin memang serakah dan keserakahan sudah menghuni jiwanya. Sehingga keserakahan itu telah menumpulkan jiwanya pula. Karenanya mereka tega mengambil keuntungan pribadi dan melupakan bangsanya yang sedang belajar bangkit kembali di tengah pandemi. Mungkin mereka juga lupa, ada kitab suci ketika dilantik dan disumpah sebagai pejabat.

Naning, 08122733xxx

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustuti, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Eddy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklikanryk23@yahoo.com, iklikanryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi:Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs Hdm Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio** : KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Suniyarsih, Wakil : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP